

Trend Kebijakan Pembangunan Pagar Pembatas Perbatasan di Negara-Negara Eropa Timur

Daffa Satria Mulyadi¹, Nuraeni²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

e-mail: *¹daffasatriam@gmail.com, ²nuraeni@unpad.ac.id

Abstract

The refugee crisis that took place within the European Union in 2015 has caused a lot of pressure on the bordering countries of the European Union due to the Dublin Regulation policy and the principle of sharing responsibilities that must be carried out by all EU countries. Unfortunately the countries that feel most disadvantaged are increasingly leaving the existing forms of policy, one of which is by choosing a policy of building the border fences in their border areas where refugees and asylum seekers usually pass. This article will look at how Eastern European countries such as Greece, Hungary and Bulgaria are carrying out a policy of building border fences at their borders in response to their disappointment with the European Union and to keep the refugees and asylum out from entering their territories. This article will give a description of how the policy was taken and illustrate the existence of the supporting factors behind the decision such as populist government factors, geographical factors, and historical factors. Finally, this article is also considered important to see how a policy can become a trend towards other countries due to the momentum, even though the policy may not be the best.

Keywords—Border fence, Eastern Europe, Refugee and Asylum Seeker.

Abstrak

Krisis pengungsi yang berlangsung di Uni Eropa tahun 2015 lalu telah menimbulkan banyak tekanan terhadap negara-negara perbatasan Uni Eropa akibat adanya kebijakan Regulasi Dublin dan prinsip sharing responsibilities yang harus dijalankan oleh seluruh negara Uni Eropa. Sayangnya negara-negara yang merasa paling dirugikan semakin meninggalkan bentuk kebijakan yang ada, salah satunya ialah dengan memilih kebijakan pembangunan pagar pembatas di wilayah perbatasan mereka dimana pengungsi dan pencari suaka biasa lewati. Artikel ini akan melihat bagaimana negara-negara Eropa Timur seperti Yunani, Hungaria, dan Bulgaria yang melakukan kebijakan pembangunan pagar pembatas di perbatasannya sebagai aksi respon atas kekecewaannya terhadap Uni Eropa dan untuk menghalau pengungsi dan pencari suaka untuk masuk ke wilayahnya. Artikel ini akan memberikan deskripsi bagaimana kebijakan tersebut diambil dan menggambarkan keberadaan faktor pendukung yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut seperti faktor pemerintahan yang populis, faktor geografis, dan faktor historis. Terakhir artikel ini juga dirasa penting untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dapat menjadi tren terhadap negara-negara lain akibat momentum yang ada, walaupun kebijakan tersebut mungkin bukanlah yang terbaik.

Kata kunci—Eropa Timur, Pagar Pembatas, Pengungsi dan Pencari Suaka

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fenomena krisis pengungsi di Uni Eropa yang berlangsung sepanjang tahun 2015 lalu, telah memunculkan banyak kekhawatiran dan mengungkap fakta-fakta baru mengenai berbagai permasalahan dalam alur penyelesaian penerimaan suaka bagi pengungsi dan pencari suaka di negara-negara kawasan Uni Eropa. Walaupun di dalam Uni Eropa sendiri telah terdapat sistem regulasi yang jelas dan terstruktur untuk dapat dijalankan oleh seluruh negara anggotanya terkait tatacara penerimaan suaka, nyatanya beberapa negara semakin condong memilih sistem regulasi sesuai preferensinya masing-masing dalam menjalankan kebijakan luar negerinya mengenai sistem regulasi penerimaan imigrannya, termasuk terhadap pengungsi maupun pencari suaka terutama pasca terjadinya peristiwa krisis pengungsi 2015. (The Washington Post, 2015)

Selama tahun 2015, UNHCR melaporkan jumlah individu di lingkup global yang harus melakukan perpindahan secara paksa mencapai jumlah rekor sebanyak 65,3 juta jiwa, yang terbagi atas 21,3 juta jiwa pengungsi, 3,2 juta jiwa pencari suaka, dan 40,8 juta jiwa pengungsi internal (*internally displaced persons*) (UNHCR, 2016, hal. 2)

Menurut laporan statistik Eurostat, mengenai jumlah aplikasi pencari suaka yang masuk ke kawasan Uni Eropa, sepanjang tahun 2015, terdapat 1.255.600 jiwa aplikasi yang mengajukan penerimaan suaka untuk pertama kali ke negara-negara anggota Uni Eropa, dengan 3 negara yang mendominasi ialah pencari suaka yang berasal dari Irak, Afghanistan, dan Syria. Jumlah total tersebut bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat dari jumlah di tahun sebelumnya yakni yang hanya sebesar 562.680 jiwa (Eurostat, 2016, hal. 1)

Selain permasalahan lonjakan jumlah pencari suaka, isu yang menjadi sorotan

utama ialah adanya ketidakmerataan jumlah negara yang menjadi tujuan para pencari suaka Statistik menunjukkan bahwa, lebih dari 75% pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke kawasan Uni Eropa selama tahun 2015, hanya terpusat di 6 negara saja, yakni Jerman, Hungaria, Swedia, Austria, Italia, dan Prancis. Dimana Jerman sendiri mencakup 35% jumlah aplikasi yang masuk. (Eurostat, 2016, hal. 1). Dengan ketidakmerataannya jumlah pengungsi yang ada di sejumlah kecil negara saja, maka tentunya terjadi penumpukan pengungsi yang menjadikan kondisi pengungsi yang ada menjadi terluntang-lantung, bahkan diyakini menjadi sasaran objek kekerasan sosial, korban kelaparan, maupun berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Permasalahan tersebut ditengarai disebabkan oleh berbagai kekurangan baik secara regulasi maupun dalam pengimplementasiannya yang dimiliki oleh *Common European Asylum System* atau CEAS, yang mana merupakan bentuk sistem regulasi yang berlaku bagi pemberian suaka di negara anggota Uni Eropa. *Common European Asylum System* yang dibentuk pada Mei 1999 melalui Perjanjian Amsterdam sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang berisi mengenai standar-standar umum perlindungan internasional dengan tujuan untuk menyeleraskan interpretasi terhadap penerimaan hukum penerimaan suaka sesuai konsep dan kriteria umum yang berlaku diantara negara-negara anggota Uni Eropa yang dilaksanakan dengan prinsip solidaritas dan pembagian tanggung jawab “*sharing responsibilities*” (European Asylum Support Office, 2016, hal. 13,22)

Kegagalan CEAS dalam mengantisipasi fenomena krisis pengungsi tahun 2015 lalu tersebut, menimbulkan polarisasi diantara negara-negara anggota Uni Eropa dalam menyikapi kedatangan dan pemberian suaka terhadap bentuk migran seperti pengungsi dan pencari suaka. Negara-negara yang

terbukti kewalahan dalam menghadapi lonjakan pengungsi pada tahun 2015 lalu, mulai menerapkan pembatasan atau bahkan menutup negaranya dengan berbagai cara untuk menghindari kedatangan pencari suaka yang masuk ke negaranya. Langkah negara-negara tersebut yang berubah haluan menjadi menjalankan kebijakan imigrasi tertutup tersebut nyatanya menghasilkan efek domino diantara negara-negara Uni Eropa (The Washington Post, 2015)

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengungsi dan Pencari Suaka

Menurut *The 1951 Refugee Convention* yang telah diamandemen dalam *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967, dalam artikel 1 butir A (2), pengungsi didefinisikan sebagai;

“A person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.” (United Nations High Commissioner for Refugees, 2010, p. 14)

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk seseorang dapat diakui statusnya sebagai pengungsi, seseorang harus memiliki *well-founded fear*, terhadap persekusi apabila dirinya kembali ke negara ataupun tempat tinggal asalnya. Bentuk *well-founded fear* tersebut, haruslah berhubungan/beralasan terhadap satu atau lebih penyebab yang diantaranya ialah faktor ras, agama, kebangsaan (*nationality*), keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, maupun pendapat politik.

Secara konseptual, pengungsi dianggap sebagai suatu konsep yang terlalu

digeneralisasi maknanya oleh berbagai kalangan. Dalam bukunya *The Refugee in International Society*, Emma Haddad mengajukan definisi baru yang mencoba melihat bahwa tiap individu dengan status pengungsi memiliki bentuk pengalaman dan sejarah yang berbeda satu sama lainnya. *“A ‘refugee’ is an individual who has been forced, in significant degree, outside the domestic political community indefinitely.* (Haddad, 2008, hal. 42)

Definisi diatas dianggap lebih sesuai menunjukkan konsep pengungsi yang ada, dimana didalamnya terkandung tiga elemen utama, yang diantaranya ialah (Haddad, 2008, hal. 42-43)

- a) Menunjukkan “tingkat” paksaan yang ada dalam pembentukan pengungsi. Elemen ini memiliki makna bahwa individu tidak memiliki opsi lain selain menjadi pengungsi, dimana apabila hubungan individu dan negara asalnya berjalan dengan baik, individu tidak akan terpaksa untuk melakukan perpindahan.
- b) Menunjukkan elemen “sementara”, dimana secara teoritis, bentuk migran selain pengungsi akan mampu untuk kembali ke negara asalnya kapanpun dia inginkan, namun dalam kasus pengungsi, selama kondisi di tempat asal masih mencegah mereka untuk kembali, pengungsi belum mampu untuk kembali ke negara asalnya.
- c) Menunjukkan bahwa konsep pengungsi pada dasarnya bersifat politis, dimana isu pengungsi merupakan bentuk isu politik baik dalam agenda nasional maupun internasional, bagi negara asal, negara penerima, maupun komunitas internasional secara keseluruhan.

Hal penting lainnya dalam memahami konsep pengungsi terutama pergerakan mereka ialah aktor-aktor yang terlibat didalamnya, yakni dalam bentuk negara asal (*home country*), individu terlantar (*displaced*

individual), dan negara penerima (*host country*). Aktor lainnya seperti pelaku persekusi ataupun NGOs yang memainkan peran pelindung, sifatnya tidak mutlak, sehingga aktor utama yang dimiliki tetap ketiga jenis aktor diatas (Haddad, 2008, hal. 5).

Keberadaan pengungsi juga bukanlah sebuah konsekuensi dari kelemahan sistem internasional, namun merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari dari keberadaan masyarakat internasional. Selama negara masih berdiri dengan perbatasan politik yang dimilikinya, konsep *insider* dan *outsider* akan tetap ada, dimana eksistensi pengungsi juga akan selalu menyertainya (Haddad, 2008, hal. 7)

Kepemilikan status "*outsider*" yang erat dengan pengungsi inilah yang membedakan mengapa pengungsi dianggap banyak menimbulkan masalah di negara penerima dibandingkan jenis migran lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa pergerakan transnasional yang dilakukan migran dan imigran merupakan atas dasar pilihan sehingga mereka telah sadar akan kompromi yang akan dibuat untuk memposisikan identitas mereka terhadap lingkungan baru mereka. Sementara bagi pengungsi, hak untuk menentukan pilihan untuk melakukan pergerakan telah hilang, dimana mereka secara mutlak harus melakukan pergerakan. Hal inilah yang menjadi dasar dimana pengungsi lebih cenderung mempertahankan identitas asalnya secara kuat dengan alasan memastikan budaya dan identitas asal mereka tidak hilang dan kurang berkeinginan untuk mengadopsi identitas baru yang sesuai dengan negara asal (Haddad, 2008, hal. 7-8).

2.2 Perbatasan di Era Globalisasi

Konsep mengenai perbatasan yang sering kali dikenal dalam istilah *border* atau *borderland*, merujuk pada area yang melekat

disekitar garis batas negara dan membentuk bagian terluar dari wilayah sebuah negara.

"The terms border and borderland are synonyms. They are both zones of indeterminate width that form the outermost parts of a country, that are bounded on one side by the national boundary. (Prescott & Triggs, 2008, p. 12)

Sementara itu, garis perbatasan atau *boundaries* sendiri didefinisikan sebagai garis batas pemisah kontak fisik antar negara yang dapat membentuk peluang kerjasama ataupun perselisihan antar pihak. (Prescott & Triggs, 2008, p. 5)

Pasca berakhirnya perang dingin, gagasan mengenai globalisasi muncul semakin kuat, dengan dibentuknya berbagai organisasi perdagangan seperti NAFTA dan Uni Eropa, semakin menegaskan adanya pergeseran tatanan sistem internasional kedalam bentuk *borderless world* (Ohmae, 1990 dalam Jones, 2012, hal. 5). Menurut Warwick J. McKibbin (McKibbin, 2000), globalisasi sendiri merupakan proses meningkatnya bentuk saling ketergantungan dalam integrasi aktivitas ekonomi, sosial, dan politik yang melewati batas-batas negara.

Sejalan dengan perubahan situasi dunia internasional, tujuan dari pembentukan *border* antar negara juga turut berevolusi. Tujuan yang dianggap paling tua dan tradisional ialah sebagai bentuk pertahanan militer antara kedua belah pihak yang masih berlawanan, contohnya ialah zona demiliterisasi di semenanjung Korea (Jones, 2012, hal. 9). Sementara untuk tujuan yang lebih umum dan kontemporer, *border* tidak lagi bertujuan sebagai bentuk pertahanan militer suatu negara, melainkan sebagai bentuk kesepakatan bersama yang memisahkan suatu bentuk rezim pemerintahan dan kedaulatan dari sistem administrasi dan hukum yang berbeda, yakni

batas satu negara dengan negara lainnya. (Jones, 2012, hal. 10).

Pergeseran konsep *border* yang terakhir setelah sebagai bentuk pertahanan, dan pengakuan kedaulatan masing-masing negara ialah sebagai bentuk pencegahan dari pergerakan individu dalam konteks memerangi migran ilegal, terorisme dan keamanan nasional. *"In this era, the purpose of borders has shifted again to become a site where privilege is protected and undesirable movements are prevented"* (ROSIÈRE & JONES, 2012, hal. 221).

Selain itu, contoh kasus yang dapat menunjukkan perubahan lansekap internasional dan pengaruhnya terhadap pergeseran konsep *border* ialah dengan adanya peristiwa serangan terorisme di AS pada 11 September 2001. Dengan adanya peristiwa tersebut, lansekap dalam isu perbatasan negara juga turut terkena dampak yang signifikan, dimana sifat negara yang pada awalnya di dalam tahap yang semakin terbuka dalam konteks perbatasannya (*"opening" of borders*) beralih menjadi lebih tertutup (*"hardening" of borders*) (ROSIÈRE & JONES, 2012, hal. 232).

2.3. Pagar dan Tembok Perbatasan

Melihat dari sejarah, gagasan mengenai dibangunnya konstruksi tembok perbatasan untuk menjaga seseorang untuk tetap berada di masing-masing wilayahnya (sisi luar dan dalam tembok) bukanlah bentuk fenomena baru, dimana bukti paling awal dapat dilihat dalam keberadaan Tembok Besar China yang dibangun 2500-500 tahun lalu dan Hadrian's Wall di utara Inggris yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 122 Masehi yang berfungsi untuk memberi tanda bagi batas wilayahnya dan juga mencegah pergerakan para kriminal. Pembangunan tembok maupun benteng di era kuno dan pertengahan tersebut mayoritas bertujuan untuk melindungi masyarakat dan sumber

daya yang mereka miliki dari berbagai bentuk serangan (Jones, 2012, hal. 9)

Selain itu, menurut Sack, keberadaan tembok pemisah juga dianggap sebagai bentuk dari penegasan kepemilikan teritorial secara politik baik oleh individu maupun kelompok; *"The attempt by an individual or group to affect influence or control people, phenomena and relationships by delimiting and asserting control over a geographical area"* (Sack, 1986, p. 19)

Ada perbedaan mendasar antara penggunaan istilah pagar (*fence*) dan tembok/dinding (*wall*) sebagai pilihan utama dalam pembangunan *barrier* di wilayah perbatasan. Dalam level teknis dan material, perbedaan antara pagar dan tembok dapat menunjukkan perbedaan dari sisi, biaya, tujuan utama, dan efektifitas. Istilah pagar, diidentikan sebagai konsep yang bersifat sementara atau non permanen, dimana pembangunan pagar lebih cepat dilakukan, lebih murah dan tidak sepenuhnya menutupi penglihatan pihak lain terhadap sisi yang berseberangan. Sementara itu, dinding diidentikan dengan konsep yang lebih matang, dimana dengan tembok, penglihatan antar pihak sepenuhnya terhalangi, lebih tahan dari bentuk serangan bersenjata, dan juga biaya konstruksi yang lebih mahal. Pagar juga lebih populer di antara negara-negara miskin dan berkembang, sementara pilihan penggunaan tembok lebih populer di negara yang lebih maju (Jones, 2012, hal. 225).

3. Metode Penelitian (jika artikel merupakan hasil riset)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berpedoman pada pemikiran Christopher Lamont dalam buku *Research Methods in International Relations* dan *Case Study Research and Applications* karya

Robert K. Yin. Peneliti memilih metode ini karena kesesuaian sifat metode penelitian kualitatif yakni memberikan pemahaman mendalam baik dalam konteks suatu fenomena, wilayah, negara, organisasi, ataupun individu (Lamont, 2015, hal. 78).

Metode penelitian kualitatif juga dipilih karena dianggap mampu menjawab suatu rumusan masalah yang membutuhkan bentuk pemahaman makna dan penjelasan dari suatu proses sosial yang kompleks secara mendalam bagi peneliti, melalui analisa beragam instrumen dan sumber penelitian yang didapatkan, secara interpretatif (Lamont, 2015, hal. 78).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Uni Eropa

Dengan adanya tren peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang mengajukan penerimaan suaka di kawasan Uni Eropa dari tahun 2013-2016 (Eurostat, 2019) menunjukkan bahwa banyak *pull factors* yang menjadikan Uni Eropa sebagai kawasan favorit yang menjadi tujuan pengungsi dan pencari suaka. *Pull factors* umum seperti ketersediaannya banyak lapangan kerja, serta peluang yang lebih baik dalam mendapatkan penghidupan yang lebih layak menjadikan Uni Eropa terutama kawasan Eropa Barat menjadi tujuan banyak pengungsi dan pencari suaka.

Mengutip pernyataan dari Eugenio Lilli, salah satu tenaga ahli dari *department of war studies King's College London*, menyebutkan bahwa

"People fleeing armed conflict in the Middle East migrate to Europe because they see Europe as a place of peace and wealth compared to the violence and despair that characterise their home countries." (King's College London, 2015)

Pernyataan tersebut menekankan bahwa mayoritas pengungsi yang berasal dari area Konflik Timur Tengah memiliki motivasi tertentu untuk mencari suaka ke kawasan Uni Eropa.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat *pull factors* lain yang berperan dalam pergerakan individu dalam mencari suaka, yakni peran geografis (Kugiel, 2016, hal. 48). Pada awalnya pengungsi di negara-negara konflik akan cenderung untuk memilih negara-negara tetangga yang mampu menyediakan tempat aman, salah satu negara tetangga populer bagi pengungsi dan pencari suaka ialah Jordania dan Lebanon, namun dengan jumlah pengungsi yang tidak sebanding dengan kemampuan negara tersebut dari segi demografi dan juga infrastruktur, serta keengganan negara Timur Tengah yang lebih mampu dari segi ekonomi untuk terbuka terhadap pengungsi dan pencari suaka seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (King's College London, 2015) menjadikan Uni Eropa terutama negara-negara Eropa Barat menjadi tujuan utama para pengungsi dan pencari suaka.

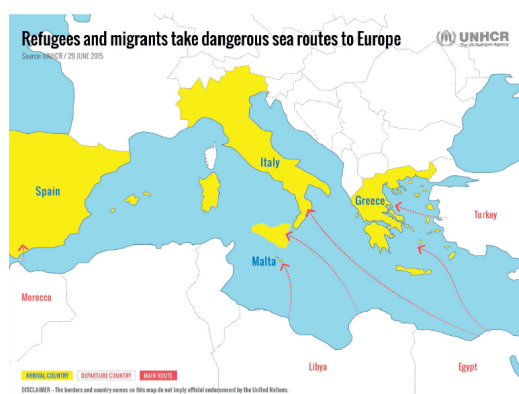
Sejalan dengan kondisi tekanan yang semakin tinggi tersebut, negara-negara garis terluar Uni Eropa mulai menerapkan kebijakan baru dalam menangani lonjakan pengungsi dan imigran ilegal, salah satunya ialah dengan melakukan pembangunan pagar pembatas di perbatasan negaranya yang populer dijadikan rute pergerakan pengungsi dan pencari suaka. Berikut adalah beberapa kasus contoh pembangunan pagar pembatas oleh negara-negara di Eropa Timur terkait dengan fenomena krisis pengungsi Eropa.

3.2 Kasus Pagar Pembatas Yunani-Turki

Sebagai negara dengan letak geografis yang sangat strategis bagi jalur migrasi pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke kawasan Uni Eropa, Yunani sudah sejak lama memiliki permasalahan terhadap isu terkait

dengan arus migrasi dan penegakan “*border control*” terhadap tingginya jumlah imigran yang masuk ke negaranya. Perlu diketahui bahwa pengungsi dan pencari suaka dapat memasuki Yunani melalui dua jalur kedatangan, yakni melalui jalur laut dan jalur darat. Rute kedatangan melalui jalur laut, terbagi lagi atas dua rute yang berbeda, yakni melalui Laut Mediterania yang memisahkan Yunani dengan Mesir dan kawasan Afrika Utara, dan melalui Laut Aegea yang memisahkan Yunani dengan Turki. Sementara dengan rute kedatangan melalui jalur darat, rute yang ada ialah dengan memasuki Yunani melalui perbatasan daratnya dengan Turki.

Gambar 1. Rute kedatangan pengungsi dan pencari suaka menuju Uni Eropa melalui jalur laut



Sumber: (UNHCR, 2015, hal. 3)

Perbatasan darat antara Yunani dan Turki tersebut, terbentang sepanjang 120 mil atau sekitar 193 km, dimana mayoritas dari perbatasan tersebut dipisahkan oleh aliran Sungai Evros yang terkenal memiliki arus yang deras dan berbahaya untuk diseberangi (Reuteurs, 2016). Namun terdapat pengecualian dengan keberadaan bentangan daratan yang menjorok dari aliran sungai yang menjadikan terdapat perbatasan negara sepanjang 12km yang bukan merupakan aliran sungai namun berupa daratan yakni di daerah dekat kota Orestiada, daerah Timur-Utara Yunani. Wilayah tersebut merupakan

satu-satunya jalan bagi pengungsi untuk mencapai Yunani, sehingga cukup banyak pengungsi yang menyebrang di wilayah ini. Daerah sungai tersebut sendiri dapat dilintasi dengan perahu kecil di musim dingin, atau dilalui dengan berjalan kaki di musim panas ketika kondisinya kering (Global Security, 2017)

Pada 1 Januari 2011, Menteri Perlindungan Warga Negara Yunani, “*Minister for Citizen Protection*” Christos Papoutsis, dibawah pemerintahan Perdana Menteri saat itu yakni George Papandreou dari partai *Panhellenic Socialist Movement* (PASOK), partai sayap kiri berbasis sosio-demokratis (Nordsieck, 2019) menyatakan bahwa Yunani akan mulai melaksanakan pembangunan pagar pembatas di satu-satunya perbatasan yang dipisahkan langsung oleh daratan antara Yunani dan Turki tersebut. Pagar kawat berduri yang dibangun setinggi 13 kaki (sekitar 4 meter) diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun pengerjaan dengan total biaya sebesar tiga juta euro (Public Radio International, 2012).

Pada akhirnya, pembangunan konstruksi pagar pembatas tersebut dimulai pada Oktober 2011 dan rampung pada Desember 2012. Konstruksi tersebut memakan total biaya 3.3 juta dolar AS dan dilengkapi dengan kamera sensor panas “*thermal camera*” (Huffington Post, 2015). Pembangunan pagar tersebut pada akhirnya terbukti efektif dalam mengurangi jumlah imigran yang masuk di area tersebut, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan pengungsi dan pencari suaka yang ada, dampak yang paling dirasakan ialah adanya perubahan arus pergerakan pengungsi, baik itu pengungsi yang memilih menggunakan jalur laut, ataupun jalur Balkan melalui perbatasan Turki-Bulgaria.

Dengan masih tingginya tingkat kedatangan pengungsi dan pencari suaka ke Yunani melalui jalur laut, menjadikan pembangunan pagar pembatas yang ada

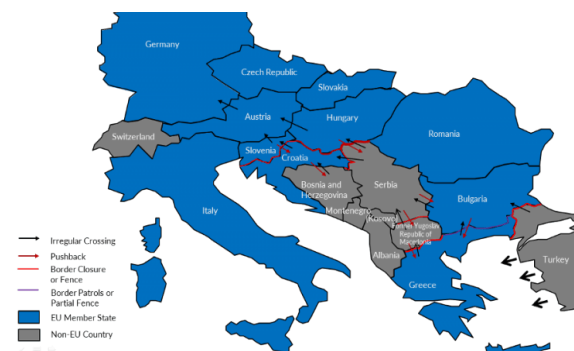
kurang terlihat keefektifitasannya dalam menekan jumlah kedatangan pengungsi dan penari suka yang masuk ke Yunani, sebagai contoh, pada tahun 2012 jumlah aplikasi pencari suka di Yunani berjumlah 9575 jiwa, sementara pasca pembangunan pagar pembatas rampung pada Desember 2012, di tahun selanjutnya Yunani mengalami penurunan jumlah aplikasi yakni 7860 jiwa di tahun 2013, dan 7485 jiwa di tahun 2014 (Eurostat, 2019) hal tersebut dilihat sebagai pencapaian yang luar biasa mengingat negara lain mengalami peningkatan jumlah aplikasi pencari suka dalam periode yang sama. Namun, dalam tahun-tahun selanjutnya, jumlah aplikasi pencari suka di Yunani tetap mengalami peningkatan yang tinggi yakni dengan jumlah berturut-turut sebesar 11.370, 49.875, dan 56.940 jiwa pada tahun 2015-2017 (Eurostat, 2019).

4.2 Pagar Pembatas Hungaria-Serbia & Kroasia

Negara Eropa Timur lain yang memilih kebijakan pagar pembatas di perbatasan negaranya sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suka pasca terjadinya krisis pengungsi Eropa 2015 ialah Hungaria. Hungaria merupakan negara transit populer bagi pengungsi dan pencari suka yang melewati Rute Balkan Barat, dengan jalur Serbia- Hungaria- Austria. Kondisi tersebut menjadikan Hungaria mendapatkan tekanan dari perbatasan mereka dengan Serbia di wilayah selatan. Dengan kondisi yang dianggap semakin mengancam bidang pertahanan negara mereka. Pada 17 Juni 2015, pemerintah Hungaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban yang merupakan bagian aliran populis sayap kanan dari partai Fidesz atau *Hungarian Civic Alliance* dimana dirinya sangat vokal menyuarakan wacana anti migran, memerintahkan untuk menutup perbatasan

selatan mereka dengan Serbia dan Kroasia (S4C, 2018)

Gambar 4.2 Peta arus kedatangan pengungsi dan pagar pembatas di Eropa Timur



Sumber: Migration Policy Institute (Migration Policy Institute, 2017)

Walaupun secara geografis Hungaria bukan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan sumber kedatangan pengungsi seperti Italia, Yunani, dan Turki, kondisi yang dibatasi langsung oleh Serbia yang bukan merupakan anggota Uni Eropa, menjadikan kerugian tersendiri bagi Hungaria. Kondisi tersebut menjadikan seluruh pengungsi dan pencari yang datang dari Serbia, merupakan tanggung jawab Hungaria untuk diproses aplikasi permohonan suakanya, dimana hal tersebut sesuai dengan Regulasi Dublin Uni Eropa yang menjadikan negara Uni Eropa pertama yang didatangi oleh pengungsi dan pencari suka bertanggung jawab dalam menangani aplikasi permohonan suka.

Kondisi tersebutlah yang menjadikan Hungaria sebagai negara kedua dibelakang Jerman dalam jumlah pencari suka yang masuk, dimana sepanjang tahun 2015, Hungaria didatangi 174.435 jiwa pengungsi dan pencari suka (Eurostat, 2016, hal. 1) Hal tersebut diperparah dengan kondisi Hungaria yang tidak memiliki kemampuan yang setingkat dengan negara Eropa Barat dalam menangani krisis yang ada, sebagai contoh,

rendahnya populasi yang dimiliki Hungaria dibandingkan negara lain, menjadikan dari tiap 1 juta penduduk Hungaria, terdapat beban 17.699 pengungsi dan pencari suaka yang perlu ditanggung negara, jumlah persentase aplikasi pencari suaka terhadap populasi negara (*applicants relative to the population*) tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan negara Uni Eropa lainnya (Eurostat, 2016, hal. 2). Tingginya beban yang ada, disertai rasa kekecewaan Hungaria terhadap langkah Uni Eropa dalam menangani krisis yang dianggap “lamban”, serta kritik terhadap Regulasi Dublin dan CEAS yang mengatur penerimaan suaka di Uni Eropa, merupakan sekian alasan yang melandasi keputusan Hungaria dalam membangun pagar pembatas yang ada (Nolan, 2015).

Konstruksi pagar kawat berduri setinggi 4 meter yang dilengkapi dengan pasukan penjagaan militer tersebut dibangun oleh Pasukan Pertahanan Hungaria *Hungarian Defence Forces*, konstruksi yang ada di sepanjang wilayah perbatasan Hungaria-Serbia terbentang sepanjang sekitar 170 km, selesai dibangun pada 17 September 2015. Sementara di wilayah perbatasan Hungaria-Kroasia, konstruksi pagar sepanjang 175 kilometer selesai sesuai rencana awal yakni pada 21 Oktober 2015 (BESENYŐ, 2017).

Pasca pembangunan pagar pembatas di perbatasannya dengan Serbia dan Kroasia rampung diakhir tahun 2015, Hungaria langsung merasakan dampak yang ada dari pembangunan pagar tersebut. Menurut data Eurostat, sepanjang tahun 2015 dimana krisis pengungsi tengah berlangsung di Uni Eropa, Hungaria mengalami jumlah lonjakan pengungsi dan pencari suaka dari 41.215 jiwa ditahun 2014 menjadi 174.435 jiwa sepanjang 2015. Namun dengan adanya pagar pembatas yang membatasi pergerakan pengungsi ke Hungaria melalui jalur Balkan Barat, jumlah tersebut menurun drastis menjadi 28.215 jiwa pada tahun 2016 dan

hanya 3.115 jiwa di sepanjang tahun 2017 (Eurostat, 2019).

4.3 Pagar Pembatas Bulgaria-Turki

Jauh sebelum Bulgaria mengumumkan rencana pembangunan pagar pembatas di perbatasannya dengan Turki di tahun 2014, Bulgaria pada dasarnya telah melakukan kebijakan serupa di tahun 1980an, ketika Bulgaria masih menjadi negara komunis dan bagian dari Blok Timur Uni Soviet (Kirişci, 2019). Namun, kedua bentuk kebijakan dari keberadaan pagar di perbatasan Bulgaria-Turki tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terletak dari kegunaan pagar tersebut, dimana tujuan utama pagar yang dibangun oleh Komunis Bulgaria ialah untuk menghalau pergerakan manusia untuk keluar dari negaranya, bukan sebaliknya.

Status Bulgaria sebagai negara penganut komunis dan bagian dari Blok Timur, di era Perang Dingin saat itu pastinya tidak terlepas dari keberadaan individu-individu maupun lawan politik di dalam lingkup domestik negaranya yang berpandangan kontra terhadap rezim yang sedang berkuasa. Di saat yang sama, Bulgaria berbatasan langsung dengan Rumania, Yugoslavia, Yunani dan Turki dimana Rumania dan Yugoslavia juga memiliki basis komunis, sementara untuk Yunani dan Turki kedua negara tersebut merupakan negara non-komunis atau negara kapitalis yang sering dijadikan tempat pelarian individu-individu yang tidak memiliki paham yang sama dengan rezim komunis yang berkuasa. Dengan kondisi perbatasan Bulgaria-Yunani yang ekstrim untuk dilalui dengan medan pegunungan, perbatasan Bulgaria-Turki menjadi satu-satunya rute yang dapat ditempuh simpatisan pemberontak untuk kabur dari Bulgaria (Savova, 2020).

Melihat kondisi yang ada, perbatasan tersebut menjadi kawasan yang dijaga ketat

oleh pemerintahan Bulgaria, dimana pengawasan bahkan sudah dimulai 40km dari garis perbatasan kedua negara. Area tersebut akhirnya dikenal dengan “no go zone” dan “no man’s land” area, akibat lapangnya area tersebut tanpa adanya vegetasi dan pepohonan, menjadikan individu-individu yang akan melewati perbatasan dapat terlihat dengan mudah. Selain bentuk penjagaan oleh angkatan bersenjata, di garis perbatasan antara Bulgaria-Turki sendiri sudah dilengkapi dengan “triple border fence” sebagai bentuk pertahanan terakhir. Sulitnya situasi tersebut juga diperparah dengan keberadaan pasukan penembak, yang tidak segan untuk menembak mati individu yang tertangkap tangan sedang berusaha untuk melewati perbatasan Bulgaria-Turki. Dimana pada akhirnya tidak sedikit individu yang harus merengang nyawa di area perbatasan tersebut (Savova, 2020)

Dalam kasus modern Bulgaria, keputusan dalam membangun pagar pembatas dilatarbelakangi oleh kondisi lonjakan pengungsi dengan jumlah yang sebelumnya tidak pernah dihadapi oleh Bulgaria yang dimulai sejak tahun 2013 lalu. menjadikan pemerintah Bulgaria kewalahan dalam menangani permasalahan yang ada. Bentuk ketidakmampuan pihak berwenang dapat terlihat mulai dari adanya permasalahan menegnai waktu pengajuan klaim dan pendaftaran aplikasi suaka, hingga pemeriksaan aplikasi yang memakan waktu yang dianggap terlalu lama, bahkan dalam banyak kasus aplikasi pelamar suaka dinyatakan hilang (Doitchev, 2016, hal. 57). Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadikan penumpukan jumlah pelamar suaka, dimana kondisi pengungsi dan pencari suaka di pusat penerimaan yang ada menjadi sangat padat. Kondisi yang tidak memadai tersebut dan juga adanya laporan terjadinya pelanggaran HAM terhadap pengungsi, menjadikan Bulgaria dinilai telah gagal dalam menangani kasus yang ada, baik oleh

pihak internal domestik maupun pihak internasional.

Terkait dengan permasalahan yang ada, pada 24 Oktober melalui menteri Pertahanan Bulgaria Angel Naydenov dibawah pemerintahan Perdana Menteri Plamen Oresharski, Bulgaria resmi mengumumkan rencana pembangunan pagar pembatas di perbatasan bagian selatan dan timur negaranya dengan Turki sepanjang 30 km untuk memerangi tekanan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Bulgaria.

Pada 2 Januari 2014, UNHCR dalam laporannya yakni *Bulgaria as a Country of Asylum: UNHCR Situation of Asylum in Bulgaria* memutuskan untuk menghentikan sementara sistem Regulasi Dublin, sebagai sistem penerimaan suaka yang berlaku di Uni Eropa (UNHCR, 2014). Padahal sebagai anggota Uni Eropa, pada saat itu sistem penerimaan pengungsi di Bulgaria masih berpedoman terhadap CEAS dan Regulasi Dublin.

Dalam laporannya, UNHCR menggambarkan kondisi yang harus dihadapi oleh para pengungsi dalam pemrosesan penerimaan suaka sangatlah menyedihkan “deplorable” dan tidak sesuai dengan hak dan martabat manusia maupun privasi mereka. UNHCR juga menyebutkan bahwa terjadi bentuk penahanan yang sewenang-wenang serta durasi yang tidak jelas akibat tidak adanya regulasi dasar dalam proses penahanan pengungsi dan pencari suaka yang diatur dalam hukum Bulgaria. Selain itu, tidak adanya sistem penerimaan aplikasi suaka yang dirasa adil dan efektif menjadikan pengungsi dan pencari suaka yang ada sangat rentan untuk dikembalikan ke negara asalnya (*refoulement*).

Kritik yang dikeluarkan oleh UNHCR juga didukung oleh ECRE *European Council on Refugees and Exiles*, yang mana pada 8 Januari 2014 mengeluarkan pernyataan berupa kritikan terkait dengan RUU baru Bulgaria terkait sistem penerimaan suaka yang

memperbolehkan adanya bentuk penahanan (detensi) secara lebih luas (terhadap anak-anak yang tidak didampingi), yang mana hal tersebut sangatlah bertentangan terhadap norma internasional Uni Eropa. ECRE juga mendukung pernyataan UNHCR terkait dengan pemberhentian sementara Regulasi Dublin di Bulgaria dan merekomendasikan bantuan Uni Eropa dalam manajemen krisis yang ada (European Database of Asylum Law, 2014).

Adanya kelonggaran waktu bagi pemerintah Bulgaria pasca pemberhentian sementara Regulasi Dublin untuk dijalankan di Bulgaria menjadikan pemerintah Bulgaria resmi memulai pembangunan pagar pembatas yang sebelumnya sudah direncanakan. Konstruksi pagar kawat berduri pembatas tersebut memakan biaya awal sebesar 85 juta euro, dan dilakukan selama dua tahapan yakni, sepanjang 30 km di bawah pimpinan Plamen Oresharski dan penutupan dalam bentuk yang lebih ekstrem ketika PM Boyko Borisov memimpin dan membangun pagar lanjutan yang membentang sepanjang 236 km di perbatasan Bulgaria dan Turki. Konstruksi dan resmi rampung pada Oktober 2017 (Global Detention Project, 2019).

4.4 Perbandingan kebijakan Yunani, Hungaria, dan Bulgaria.

Perbandingan disini dibuat untuk membandingkan kebijakan yang diambil oleh Yunani, Hungaria, dan Bulgaria terkait dengan kesamaan pemilihan kebijakan dalam menghadapi isu pengungsi dan pencari suaka yakni melalui diantara ketiga negara. Ketiganya pada dasarnya berbagi beberapa karakteristik yang serupa dimana kesamaan karakteristik tersebut dapat berkontribusi dalam berlangsungnya tren pembangunan pagar pembatas perbatasan di negara-negara Eropa Timur. Pertama ialah kondisi Yunani, Hungaria, dan Bulgaria yang merupakan negara-negara batas terluar Uni Eropa (*eksternal border*).

Kondisi tersebut menjadikan negara-negara tersebut lebih rentan untuk menerima lonjakan arus pengungsi dan pencari suaka mengingat posisi geografis mereka, dan juga bagaimana sistem sharing responsibilities Regulasi Dublin Uni Eropa bekerja. Yang kedua, ketiga negara tersebut bukanlah menjadi tujuan utama pengungsi dan pencari suaka, namun merupakan negara transit populer bagi pengungsi dan pencari suaka menuju kawasan Eropa Barat. Yang ketiga, masih berbicara letak geografis, letak ketiga negara berada di persilangan rute migrasi pengungsi, yakni jalur darat melalui rute Balkan dan rute Balkan Barat dan melalui rute laut Mediterania dan Aegea khusus untuk Yunani. Yang keempat, momentum pembangunan pagar pembatas oleh ketiga negara dibarengi dengan krisis ekonomi yang melanda Eropa, ditambah dengan belum stabilnya perekonomian Bulgaria dan Hungaria secara umum jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya.

Masuk kedalam perbandingan pertama yakni Bulgaria dan Hungaria terkait kebijakan mereka yang identik, keduanya lebih jauh lagi memiliki persamaan dalam beberapa sisi. Bulgaria dan Hungaria relatif belum terlalu lama menjadi bagian Uni Eropa, dimana Hungaria masuk pada tahun 2003, sementara Bulgaria pada tahun 2007 (European Union, 2020). Rentang waktu yang masih singkat tersebut menjadikan kedua negara masih menyesuaikan berbagai bentuk kebijakan maupun *interest* sebagai bagian dari kawasan Uni Eropa, dimana dalam beberapa kondisi bentuk penyesuaian seperti penggunaan Regulasi Dublin dalam memproses aplikasi pencari suaka di saat krisis pengungsi sedang berlangsung, dapat menyulitkan dan memberatkan negara tersebut, terutama dengan latar belakang historis yang tertutup terhadap imigran.

Selain itu, kedua negara juga merupakan negara eks komunis yang masih menjalankan transisi menjadi negara demokrasi, dalam hal

ini nilai-nilai komunis yang hidup sebelumnya masih berakar cukup kuat baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan, sehingga praktik-praktik dari nilai-nilai komunisme masih sering dijumpai. Selain itu, pemerintahan kedua negara ketika memutuskan pembangunan pagar pembatas di perbatasan mereka juga sedang dipimpin oleh seorang penganut populisme sayap kanan.

Viktor Orban Perdana Menteri Hungaria dan Boyko Borisov Perdana Menteri Bulgaria juga merupakan salah satu yang paling vokal dalam menyuarakan kampanye anti migrannya terhadap Uni Eropa, sebagai bentuk afiliasi *Eurosceptic* yang semakin umum di negara-negara Eropa. Sebagai contoh, Orban secara terang-terangan menentang dilusi "nilai-nilai Kristen" Eropa oleh keberadaan imigran multikultural. *"There is no way back from a multicultural Europe. Neither to a Christian Europe, nor to a world of national cultures," he said in June. "If we make a mistake now, it will be forever."* (The Irish Times, 2015)

Eurosceptic merupakan suatu bentuk konsep yang muncul pertama kali di pertengahan tahun 80an di Inggris Raya dengan definisi sederhana ialah mengacu pada seseorang/ kelompok yang menentang bentuk kekuasaan (kebijakan) di Uni Eropa (Brack & Sartin, 2015, hal. 239). Kemunculan wacana ini pertama kali ditengarai akibat adanya dugaan mengenai *"democratic deficit"* di Uni Eropa secara kelembagaan (Torreblanca & Leonard, 2013, hal. 1).

Sementara *democratic deficit* sendiri mengacu kepada pendapat yang dilontarkan terhadap Uni Eropa dan lembaga-lembaganya, serta prosedur pengambilan keputusan kebijakan didalamnya yang dirasa kurang demokratis, dimana tidak ada akses dari warga sipil untuk menghasilkan keputusan yang demokratis akibat

kompleksitas yang ada di Uni Eropa tersebut (EUR-LEX).

Kedua negara juga merupakan negara eks komunis yang masih menjalankan transisi menjadi negara demokrasi, dalam hal ini nilai-nilai komunis yang hidup sebelumnya masih berakar cukup kuat baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan, sehingga praktik-praktik dari nilai-nilai komunisme masih sering dijumpai. Selain memiliki pandangan *Eurosceptic*, pemerintahan kedua negara yang memiliki latar belakang populis sayap kanan juga memainkan peran yang signifikan dalam bentuk kebijakan yang diambil terkait dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka.

Pemimpin yang memiliki dasar populism akan cenderung menolak segala bentuk legitimasi oposisi dan juga masyarakat pendukungnya memiliki bentuk konsekuensi tersendiri apabila tidak mendukung pemerintahan populism yang berkuasa, Populis melihat bahwa penyatuanindividu"*unification of people*" merupakan kunci utama (Muller, 2018, hal. 71). Mereka juga menilai bahwa orang-orang yang berbeda "haluan" tidaklah penting, sehingga kelompok tersebut akan menjadi pengecualian *"excluded"* dalam tiap narasi yang diangkat.

Hal tersebut pulalah yang dapat dilihat di Bulgaria, dimana partai-partai kecil berbasis liberal sangat kesulitan untuk mendobrak dominasi Boyko Borisov, sehingga iapun dapat terpilih dalam tiga periode jabatan, hal tersebut juga tentunya disebabkan oleh rendahnya pendukung partai-partai tersebut dari masyarakat secara keseluruhan (Savova, 2020). Tentunya kemungkinan adanya tekanan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri untuk menjadi oposisi juga dapat digarisbawahi, mengingat kuatnya manipulasi media yang dilakukan pemerintahan Bulgaria dalam menjaga orang-orang untuk terus dapat *mem-vote* dirinya.

Adanya kemiripan antara faktor historis yang dimiliki oleh Bulgaria dan Hungaria, kesamaan dalam posisi geografis serta kemiripan posisi politik dan pandangan anti-migran kedua pemimpin negara, didukung oleh kuatnya relasi antara kedua individu, dapat menunjukkan faktor pendukung dari contoh kecil adanya tendensi negara-negara Eropa untuk memilih menutup perbatasannya dari kedatangan imigran seperti pengungsi dan pencari suaka melalui pembangunan pagar pembatas.

Sementara itu dalam kasus Yunani, dimana merupakan salah satu negara yang paling awal dalam mengambil kebijakan pembangunan pagar pembatas di antara negara-negara Uni Eropa, kondisi yang ada cukup unik apabila dibandingkan dengan pagar pembatas yang ada di Bulgaria dan Hungaria. Ketika kebijakan mengenai pembangunan pagar-pembatas di perbatasan masing-masing negara, Bulgaria dan Hungaria tengah dipimpin oleh sosok penguasa dominan populis sayap kanan, yang telah memiliki sejarah memimpin negara dalam waktu yang cukup lama dalam diri Boyko Borisov dan Viktor Orban.

Namun dalam kasus Yunani, pada periode tersebut Yunani tengah dipimpin oleh George Papandreou dari partai Panhellenic Socialist Movement (PASOK) yang mana merupakan partai berbasis sosio-demokratis sayap kiri. Perbedaan tersebut cukup menarik karena wacana anti-migran sudah menjadi ciri dari kelompok populisme sayap kanan saat itu, namun nilai tersebut cukup bertentangan dengan apabila dilihat secara garis besar kasat mata latar belakang pemerintahan Yunani. Sosok George Papandreou juga hanya bertahan selama 2 tahun sebagai Perdana Menteri Bulgaria sebelum akhirnya digulingkan akibat krisis ekonomi yang sedang melanda Yunani sepanjang tahun 2011 tersebut.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berlangsungnya krisis pengungsi di Uni Eropa 2015 lalu, menimbulkan banyak bentuk pergeseran kekuatan di Uni Eropa sendiri. Secara kelembagaan, Uni Eropa dinilai semakin lemah dan banyak mendapatkan kritikan, menjadikan semakin banyak pihak dari internal maupun eksternal yang berpandangan eurosceptic. Nyatanya fenomena tersebut dijadikan momentum oleh kelompok populis, konservatif dan sayap kanan yang semakin populer akhir-akhir ini.

Dimulai dari negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Hungaria, dan Yunani nyatanya sangat terbantu dengan fenomena krisis pengungsi dan pencari suaka di Eropa, permasalahan tersebut dibarengi dengan depresi ekonomi di Eropa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para kelompok sayap kanan untuk menyuarakan agenda politiknya, yang mana pada akhirnya kelompok populis sayap kanan beserta partai mereka mendapatkan momentum dan konstituensi merekapun mulai mendapatkan kursi di Parlemen negaranya hingga bahkan masuk kedalam taraf parlemen Uni Eropa.

Fenomena tersebutlah yang menciptakan merembetnya wacana anti-migran dan terhadap negara-negara demokrasi di Eropa Barat dan Utara. Dan semakin dipilihnya kebijakan pembangunan pagar perbatasan.

5.2 Rekomendasi

Terkait dengan topik yang penulis angkat dalam artikel ini, diperlukan analisis yang lebih komprehensif terkait dengan fenomena kebijakan pembangunan pagar pembatas di negara-negara Uni Eropa. Analisis dapat dilihat dalam konteks kebijakan luar negeri dan motif tiap negara agar dapat ditemukan benang merah dalam tiap kasus yang ditemukan.

Daftar Pustaka

- BESENYŐ, J. (2017). Fences and Border Protection: The Question of Establishing Technical Barriers. *AARMS Vol. 16, No. 1*, 83.
- Brack, N., & Sartin, N. (2015). Introduction: Euroscepticism, from the margins to the mainstream. *International Political Science Review Vol. 36(3)*, 239-249.
- Doitchev, M. (2016). *Fortification of European Borders. The Balkan Route*. Copenhagen: Global Refugee Studies, Aalborg University.
- EUR-LEX. (n.d.). *Glossary of summaries: Democratic Deficit*. Dipetik Maret 5, 2020, dari EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html
- European Asylum Support Office. (2016). *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals*. Valletta: European Asylum Support Office.
- European Database of Asylum Law. (2014, Februari 2). *UNHCR calls for the suspension of Dublin transfers to Bulgaria*. Dipetik Desember 4, 2019, dari Asylumelawdatabase: <https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/unhcr-calls-suspension-dublin-transfers-bulgaria>
- European Union. (2020). *Countries*. Dipetik Maret 6, 2020, dari Europa.eu: europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-1
- Eurostat. (2016). *Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015*. Luxembourg: Eurostat News Release.
- Eurostat. (2019, April 24). *Asylum statistics*. Dipetik Januari 20, 2020, dari Europa.eu: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
- Global Detention Project. (2019). *IMMIGRATION DETENTION IN BULGARIA: FEWER MIGRANTS AND REFUGEES, MORE FENCES*. Jenewa: Global Detention Project.
- Global Security. (2017, Februari 17). *Greece - Turkish Border Fence*. Dipetik Desember 22, 2019, dari Global Security: <https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/gr-turkey-fence.htm>
- Haddad, E. (2008). *The Refugee in International Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huffington Post. (2015, September 24). *Why Greece Shut The Shortest, Safest Route For Migrants And Refugees*. Retrieved Desember 23, 2019, from Huffington Post: https://www.huffpost.com/entry/greece-turkey-border-fence_n_55f9ab73e4b0d6492d63ec12
- Jones, R. (2012). *Border Walls Security And The War On Terror In The United States, India, And Israel*. London: Zed Books.
- King's College London. (2015, September 4). *Why do refugees and migrants come to Europe, and what must be done to ease the crisis?* Retrieved Januari 20, 2020, from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/world-news/europe/11845205/Why-do-refugees-and-migrants-come-to-Europe-and-what-must-be-done-to-ease-the-crisis.html>
- Kirişci, K. (2019, November 5). *Beyond the Berlin Wall: The forgotten collapse of Bulgaria's 'wall'*. Dipetik Maret 10, 2020, dari Brookings.edu: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/11/05/beyond-the-berlin-wall-the-forgotten-collapse-of-bulgarias-wall/>
- Kugiel, P. (2016). *The Refugee Crisis in Europe: True Causes, False Solutions. The Polish Quarterly of International Affairs*, no. 4, 41-59.

- Lamont, C. K. (2015). *Research Methods in International Relations*. New York: Sage Publishing.
- McKibbin, W. J. (2000). *Globalization: What does it mean ?* Melbourne: Australian National University and The Brookings Institution Washington DC.
- Migration Policy Institute. (2017, Agustus 17). *Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in the European Refugee Crisis*. Retrieved Januari 22, 2020, from Migration Policy Institute: <https://www.migrationpolicy.org/article/outsourcing-migration-management-western-balkans-europes-refugee-crisis>
- Muller, J.-W. (2018). The Rise and Rise of Populism? Dalam BBVAOpenMind, *The Age of Perlexity: Rethinking the World We Know* (hal. 68-87). Bilbao: Open Mind.
- Nolan, D. (2015, Juni 17). *Hungary orders 100-mile Serbia border fence to keep out migrants*. Dipetik Januari 22, 2020, dari The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/world-news/europe/hungary/11680840/Hungary-orders-100-mile-Serbia-border-fence-to-keep-out-migrants.html>
- Nordsieck, W. (2019). *Greece*. Retrieved Maret 6, 2019, from Parties and Elections in Europe: <http://www.parties-and-elections.eu/greece.html>
- Prescott, V., & Triggs, G. D. (2008). *International Frontiers and Boundaries*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Public Radio International. (2012, Desember 17). *Greece completes border wall to keep out immigrants*. Dipetik Desember 22, 2019, dari PRI.org: <https://www.pri.org/stories/2012-12-17/greece-completes-border-wall-keep-out-immigrants>
- Reuteurs. (2016, April 4). *How Europe built fences to keep people out*. Retrieved Desember 22, 2019, from Reuteurs: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-out-idUSKCN0X10U7>
- ROSIÈRE, S., & JONES, R. (2012). Teichopolitics: Re-considering Globalisation Through the Role of Walls and Fences. *Geopolitics*, 217-234.
- S4C. (2018, November 2). *FACT CHECK: DID HUNGARY REDUCE ILLEGAL MIGRATION BY 99% WITH A BORDER WALL?* Retrieved Maret 10, 2020, from S4C News: https://en.s4c.news/2018/11/02/___trashed-3/
- Sack, R. (1986). *Human Territoriality: Its Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Savova, I. (2020, Februari 21). Director of Refugee and Migrant Program, Bulgarian Helsinki Committee. (D. S. Mulyadi, Interviewer)
- The Irish Times. (2015, Agustus 28). *Eastern Europe slams doors on refugees from Middle East*. Retrieved Maret 8, 2020, from The Irish Times: <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/eastern-europe-slams-doors-on-refugees-from-middle-east-1.2332326>
- The Washington Post. (2015, December 30). *Even Europe's humanitarian superpower is turning its back on refugees*. Dipetik June 29, 2019, dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/europe/even-sweden-is-turning-its-back-on-refugees/2015/12/30/6d7e8454-a405-11e5-8318-bd8caed8c588_story.html?utm_term=.480a99bda28
- Torreblanca, J. I., & Leonard, M. (2013). *THE CONTINENT-WIDE RISE OF EUROSCEPTICISM*. London: European Council on Foreign Relations.

UNHCR. (2015). *The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees*. Geneva: UNHCR.
UNHCR. (2016). *Global Trends Forced Displacement in 2015*. Geneva: UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2010). *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. Geneva: UNHCR.